

GLOBALISASI DARI PERSPEKTIF KRITIS

Oleh: Laily Muthmainah¹

Abstract

By the end of the twentieth century the meaning of globalization were contested in every where. Not only in the economic or political debate, but it is also in the media. There are two major questions about globalization. Is that unavioded process or just an ideological project from the owner of social power in the world? Critical perspective said that world order not only as a product from the relations between one's states to the others but also product from the relations between social powers in the world. Include at this point are material, ideological, and institutional power. And the world order formed by the configuration of it. So, in the critical perspective, globalization isn't a natural or given reality, because any dominant actor in this project. And this actor uses their social power to directing where the globalization goes on. Unfortunately, no one's (states) try to struggle from this condition. They just keep silent in this hegemonic process. The last question is how to solve this problem? And Antonio Gramsci said that war of position and war of maneuver are the ways to solve this problem.

Keywords: globalization, critical perspective, ideological project, hegemoni, war of position.

A. Definisi dan Ciri Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata "global" yang maknanya adalah universal. Dan sejauh ini globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga akan sangat tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi akan selalu dikaitkan dengan persoalan seputar meningkatnya hubungan atau keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia, yang hal ini secara real akan terbukti lewat hubungan perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan berbagai bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas negara menjadi bias. Atau secara singkat dapat

¹ Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

dikatakan bahwa akan selalu ada tiga hal yang ditemukan ketika orang mendefinisikan tentang globalisasi, yaitu *kesalingterhubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan* (Winarno, 2004: 39).

Logde (1991) sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, mengatakan bahwa setidaknya ciri utama globalisasi adalah (Winarno, 2004: 42-43),

1. Peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional/multinasional.
2. Globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah bangsa akan bergeser menjadi di bawah pengaruh badan internasional atau perusahaan multi nasional atau bisa juga lembaga keuangan dan moneter internasional. Ciri kedua ini sebenarnya terkait erat dengan konsep interdependensi, integrasi, dan kesalingterkaitan antara berbagai bidang yang tercakup dalam masyarakat bangsa.

Terkait dengan perspektif kritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan tentang globalisasi ini, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah globalisasi itu merupakan proses alamiah ataukah sekedar proyek dari satu *social power* yang sedang bermain? Esensi teori kritis sesungguhnya adalah konstruktivis, yaitu memahami keberadaan struktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari intersubjektivitas, dan pengetahuan yang pada dasarnya memiliki karakter politis, terkait dengan kehidupan sosial dan politik. Dalam perspektif kritis juga dikatakan bahwa tatanan dunia bukanlah sekedar produk hubungan antarnegara semata-mata, melainkan merupakan produk *hubungan antar kekuatan sosial*. Kekuatan sosial yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan material, ideologi, maupun institusi, sehingga negara masuk dalam salah satu komponen konsep ini. *Tatanan dunia yang ada sekarang ini merupakan konfigurasi dari kekuatan sosial tersebut*. Dan sebagai refleksi dari kekuatan sosial yang hegemonis, maka tatanan dunia akan mengalami perubahan seiring dengan munculnya hegemoni yang lain untuk menentang hegemoni tersebut (Devetak, 2001: 155).

Sehingga dalam perspektif kritis, globalisasi memang betul dianggap sebagai satu realitas, tetapi realitas globalisasi ini bukanlah sesuatu yang *given* (alamiah). Ada hal yang “tidak sehat” dalam globalisasi ini. Hal ini terlihat dengan adanya satu pihak yang dominan untuk memberi warna dan gerak pada globalisasi tersebut. Akibatnya globalisasi bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja, globalisasi harus dilihat dalam kerangka pikir bekerjanya *social power*. Ada pihak yang bermain di dalamnya karena adanya motif kepentingan, yaitu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Ibaratnya, bahwa globalisasi sebenarnya adalah sebuah proyek besar yang diusung oleh para pihak yang berkepentingan (yang memiliki *social power* tersebut) untuk kemudian menghegemoni pemikiran masyarakat manusia.

B. Neo-liberalisme dalam Proyek Besar Globalisasi

Globalisasi sebagai sebuah proyek besar memiliki ideologi utama, yaitu neo-liberalisme yang hal ini tampaknya sudah merasuki berbagai wacana, baik ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Neo-liberalisme sebagai sebuah gerakan yang sangat memuja mekanisme pasar telah menghegemoni pemikiran masyarakat dunia. Inilah yang hendak dikritisi kembali. Bahwa globalisasi yang sekarang ini dipandang sebagai sebuah tatanan atau institusi yang telah mapan *ternyata tidak mampu* menciptakan satu komunitas politik yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, keadilan, dan persamaan.

Konsep neo-liberal memang telah menghegemoni pemikiran masyarakat dunia sekarang ini. Orang begitu percayanya bahwa tidak hanya produksi, konsumsi, dan distribusi yang tunduk pada hukum pasar, melainkan seluruh kehidupan. Padahal sesungguhnya, tidak lain dan tidak bukan neo-liberalisme ini sebenarnya adalah kapitalisme atau bahkan imperialisme bentuk baru.

Dengan melihat latar belakang munculnya konsep ini, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika berbagai negara Eropa telah kehilangan kontrol terhadap negara jajahan yang sebagian besar berada di Asia dan Afrika, maka dapat dianalisis lebih jauh bahwa sebenarnya globalisasi ini hanyalah proyek yang sengaja diusung untuk mengukuhkan kembali kontrol mereka terhadap negara-negara tersebut (dunia ketiga). Dengan menggunakan mekanisme ini, negara industri maju akan tetap

memiliki kontrol terhadap negara dunia ketiga, sehingga bisa dipastikan bahwa promosi yang secara gencar diusung oleh para pendukung globalisasi hanyalah apologi belaka. Kalau dikatakan dengan menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar, maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidaklah berlaku demikian. Kekayaan pada akhirnya hanya menumpuk pada sebagian orang saja, yaitu para pemilik modal dan ketika dirunut lagi siapa sebenarnya para pemilik modal tersebut, maka jawabannya lagi-lagi adalah mereka para pemilik modal dari negara yang bermodal juga tentunya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, setidaknya ada tiga hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang mendorong munculnya neo-liberalisme sebagai inti proyek globalisasi (Wibowo, 2003: 3-5), yang pertama adalah munculnya berbagai perusahaan multinasional (MNC) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki kekayaan yang melebihi asset yang dimiliki oleh negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata memiliki kantor pusat di negara maju (AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu. Akan tetapi gerak mereka dibimbing bukan oleh nasionalisme tetapi semata-mata oleh insting untuk mengeruk keuntungan di mana pun kesempatan itu berada. Bahkan pada saat kritis, mereka ini dapat mengubah modal yang begitu besar mereka miliki sebagai *bargaining power*, dan memaksa tidak sedikit negara bertekuk lutut, bahkan juga negara rumah asal mereka (*home country*). Kedua, adalah munculnya organisasi atau *regime* internasional yang berfungsi sebagai *surveillance system* atau sebagai penjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia akan patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. Organisasi ini berupa adanya World Trade Organization (WTO), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Sedangkan yang ketiga adalah adanya revolusi di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi yang terjadi secara dahsyat dalam jangka 20 tahun terakhir.

C. Posisi Negara dalam Globalisasi

Globalisasi dengan ideologi dasarnya, yaitu neo-liberalis memiliki konsep dasar penyerahan sepenuhnya pada mekanisme pasar, yang hal ini kemudian dilakukan dengan memposisikan negara pada peran yang sangat minimal. Negara tidak boleh

melakukan campur tangan terhadap mekanisme pasar, karena dianggap akan mengakibatkan in-efisiensi. Konsep ini didasarkan atas satu argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya jika lalu lintas barang, jasa, atau pun modal tidak dikontrol oleh regulasi apa pun. Optimalisasi ini juga hanya akan terjadi apabila barang, jasa, atau pun modal dimiliki atau dikuasai oleh orang perorangan yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi.

Inilah persoalan mendasar yang terselubung dalam ideologi neoliberal, yaitu masalah kekuasaan (*power*). Proyek deregulasi yang dicanangkan oleh kaum neo-liberal sesungguhnya berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan asset finansial. Penghapusan berbagai aturan bagi operasi bisnis per definisi sebenarnya merupakan satu langkah pemberian hak istimewa dan kekuasaan yang begitu besar kepada para pemilik modal. Keluar masuknya modal dengan bebas akhirnya menjadi truf (senjata pamungkas) yang secara gratis diberikan kepada mereka. Untuk menumpuk laba, mereka tidak lagi terikat aturan lokasi produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dsb. Dalam tata ekonomi neo-liberal ini, pemilik modal dengan mudah dapat menolak tuntutan para buruh maupun peraturan pemerintah dengan memboikot penanaman modal atau pun mengancam hengkang dari satu negara ke negara lain yang memiliki syarat lunak dan memberi insentif akumulasi laba lebih tinggi dan cepat (Priyono, 2003: 61-62).

Kekuasaan yang dipegang oleh para pemilik modal ini pada akhirnya akan mengakibatkan berpindahnya hasil produksi yang diciptakan melalui keringat banyak warga masyarakat ke tangan semakin sedikit orang. Dalam arti ini resep mobilitas modal yang diajukan oleh kaum neo-liberal de facto (yang hal ini dilakukan lewat deregulasi dan liberalisasi secara serampangan) merupakan resep pemindahan berbagai sumberdaya masyarakat ke tangan pemilik modal. Kondisi inilah yang pada akhirnya akan membuat semakin lebarnya jurang kesenjangan pendapatan/income (Priyono, 2003: 63).

Menurunnya peran negara kemudian akan dikaitkan juga dengan problematika yang timbul dalam mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Berbagai kebijakan nasional yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang hingga saat ini masih berada dalam yurisdiksi pemerintah dan masyarakat dalam

satu negara, akan bergeser menjadi berada di bawah pengaruh badan-badan internasional atau perusahaan swasta besar serta pelaku ekonomi atau keuangan internasional. Hal ini menyebabkan erosi kedaulatan nasional, dan mempersempit kemampuan pemerintahan dan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya.

Kebanyakan negara sedang berkembang merasakan bahwa kemampuan mereka dalam membuat kebijakan mengalami erosi karena mereka harus mengadopsi berbagai kebijakan yang dibuat oleh entitas lain semacam Bank Dunia, WTO, atau pun IMF yang ternyata negara-negara maju berada di balik organisasi internasional ini.

Institusi-institusi Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF) akhirnya memiliki otoritas yang sangat besar di kebanyakan negara sedang berkembang yang sangat bergantung pada hutang mereka. Khususnya negara-negara yang memerlukan penjadwalan ulang hutang, harus menerapkan kebijakan penyesuaian struktural (SAPs – Structural Adjustment Policies) yang disusun oleh institusi-institusi di Washington. SAPs mencakup kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan belakangan ini mencakup juga berbagai kebijakan sosial dan persoalan struktural, seperti privatisasi, kebijakan moneter, hukum-hukum usaha dan pengelolaan. Mekanisme penyusunan persyaratan pembayaran hutang dalam kebijakan-kebijakan tersebut merupakan instrumen utama yang menggerakkan kebijakan negara yang berhutang untuk melakukan liberalisasi, privatisasi, deregulasi, dan penarikan negara dari berbagai aktivitas ekonomi dan sosial (Khor, 2001: 13-15). Yang pada intinya ini semua diarahkan pada pemberian *privilege* atau hak istimewa bagi para pemilik modal. Hal inilah yang menjadikan posisi atau *bargaining power* mereka begitu kuat.

Namun perlu juga dicermati bahwa porsi negara minimal (*minimal state*) ini ternyata justru membuat posisi negara seolah menjadi tangan kanan bagi para pemilik modal. Negara seolah justru menjadi semacam kekuatan penjamin bagi berputarnya modal para kapitalis di negara berkembang tersebut, yaitu dengan jalan menjaga stabilitas politik dari negara yang bersangkutan di samping juga menetapkan kebijakan yang pro pasar bebas. Meskipun demikian, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa negara di sini bukan aktor secara *an sich* karena negara sebenarnya hanyalah produk. Justru agen-agen (*social power*) yang berkepentingan

itulah yang menjadi aktor utama. Sehingga negara di sini dapat dikatakan hanyalah sebagai arena atau sarana berbagai kekuatan sosial yang ada.

D. Globalisasi dan Jurang Ketimpangan Antar Bangsa

Pada lingkup individual, nasional, maupun global, pertumbuhan ekonomi pertama-tama akan tergantung pada tingginya tingkat penanaman modal (investasi) privat. Investasi pada gilirannya bergantung pada tingkat tabungan (savings), dan tabungan tergantung pada tinggi rendahnya penghasilan pribadi (income). Pertumbuhan income tergantung pada bekerjanya akumulasi laba yang hanya mungkin terjadi dalam perdagangan bebas. Yang diperjualbelikan bisa barang, jasa, modal finansial, pengetahuan, ketrampilan, kecantikan, otot, dll. Karena itu perdagangan bebas per definisi akan menaikkan income. Karena income membawa kenaikan tabungan. Kenaikan tabungan membawa kenaikan investasi. Kenaikan investasi akan membawa tingginya pertumbuhan ekonomi, dst (Khor, 2001: 60).

Persoalannya adalah bagaimana memulai hal itu jika income, tabungan, dan investasi masyarakat cukup rendah? Inilah nasib semua negara miskin dan negara sedang berkembang. Kunci untuk mengatasi persoalan ini adalah penanaman modal, terutama dari negara-negara industri maju. Bahkan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam pun tidak akan bisa mulai mengayunkan gerak kecuali memiliki modal awal untuk menggali dan mengolah sumber daya alam agar dapat diperdagangkan (dan dari hasil perdagangan ini akan terjadilah re-investasi, lapangan kerja, pertumbuhan income, tabungan, lalu investasi lagi). Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan suntikan modal dari luar negeri, entah lewat pinjaman atau investasi asing.

Kebutuhan akan modal ini kemudian membuat posisi tawar dari negara-negara berkembang cenderung lemah. Mereka kebanyakan kemudian menerima prasyarat dari lembaga-lembaga keuangan internasional agar dapat memperoleh kucuran dana, yang secara umum berupa penerapan deregulasi dan liberalisasi yang mengarah pada pasar bebas. Tetapi sayangnya hal ini seringkali dilakukan secara serampangan oleh negara-negara dunia ketiga, dan akibatnya perekonomian justru semakin kacau karena kekuasaan pada akhirnya dimonopoli oleh pemilik modal.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa yang terjadi dalam globalisasi sesungguhnya adalah ketidakseimbangan/ketidakadilan dalam hal distribusi keuntungan atau pun kerugian. Kondisi ini kemudian akan mengakibatkan terjadinya pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dengan negara-negara maupun kelompok-kelompok yang termarginalisasi. Dalam globalisasi yang terjadi sekarang ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan, dan teknologi modern terpusat pada sebagian kecil negara (terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan negara-negara industri baru (NICs) di Asia Timur. Sementara itu mayoritas negara yang sedang berkembang tidak tercakup dalam kelompok ini, dan kalau pun ada seringkali porsinya sangat kecil, bahkan seringkali bertentangan dengan kepentingan dari negara sedang berkembang itu sendiri. Misalnya liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi para produsen domestik mereka, dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan instabilitas moneter dalam negeri.

Penekanan pada bekerjanya mekanisme pasar secara sempurna ternyata tidak selamanya dapat menjadi resep mujarab untuk setiap negara. Perdagangan bebas yang menghendaki penghapusan rintangan untuk bekerjanya mekanisme pasar, seperti penghapusan pajak, bea masuk, tarif, dll ternyata hanya dijadikan pihak pemilik modal sebagai hak istimewa yang kemudian akan semakin memperkokoh posisi (kekuasaan) nya.

Jika melihat uraian di atas, maka adalah hal yang sangat mustahil bahwa globalisasi akan menciptakan kesetaraan antar bangsa, karena yang terjadi justru sebaliknya. Slogan bahwa globalisasi dengan perdagangan bebasnya akan mampu membawa masyarakat kepada tataran kesejahteraan yang lebih tinggi tampaknya hanya sebuah omong kosong belaka. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Human Development UNDP tahun 1992 yang memperkirakan bahwa 20% dari populasi dunia yang tinggal di negara maju memperoleh 82,7% dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya yang tinggal di negara-negara miskin hanya menerima 1,4%. Pada tahun 1989, rata-rata pendapatan dari 20% masyarakat yang hidup di negara-negara paling kaya mencapai 60 kali lebih tinggi dari 20% masyarakat yang hidup di negara-negara paling miskin. Rasio ini merupakan dua kali rasio tahun 1950, sebesar 30 kali (Khor, 2001: 19).

Persoalan ketimpangan kesejahteraan di atas jika diuraikan lagi secara lebih terinci, setidaknya akan menyangkut beberapa persoalan berikut ini, yaitu masalah privatisasi, Hak Kekayaan Intelektual, hak-hak buruh, dan juga lingkungan hidup. Privatisasi yang semula diarahkan pada upaya untuk mentransformasi metode pengelolaan BUMN agar lebih efektif dan kompetitif terhadap sektor swasta yang lain ternyata yang terjadi hanyalah memindahkan konsentrasi penguasaan modal pada segelintir orang. Seperti dikatakan oleh John Kenneth Gailbraith, bahwa privatisasi pelayanan sosial dan perusahaan negara dimaksudkan untuk mengubah relasi kepemilikan dan sekaligus distribusi kemakmuran dan kekuasaan politik menuju pemberdayaan besar-besaran kaum kaya, perusahaan besar, dan para pemupuk rente, dengan mengorbankan “lapisan bawah” (Baswir, 2004: 37). Penyerahan berbagai sektor penting kepada swasta pada kenyataannya justru menjadi semacam *rampokisasi* atas kekayaan masyarakat untuk kemudian jatuh ke tangan pemilik modal (utamanya adalah pihak asing).

Isu selanjutnya adalah masalah hak kekayaan intelektual atau *intellectual property right*. Perjanjian internasional yang mengatur tentang HAKI ini (dalam hal ini adalah TRIPs) sebenarnya adalah bentuk ketidakseimbangan atau ketimpangan yang terjadi di dunia yang di situ negara-negara maju mendapatkan keuntungan dari keberadaan rejim HAKI dari negara-negara berkembang. Sementara itu di negara-negara berkembang banyak terjadi pencurian potensi HAKI yang berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat di negara belum maju yang diambil dan dipatenkan di negara maju. Sehingga potensi pengetahuan masyarakat yang merupakan milik kolektif masyarakat dipatenkan untuk dijadikan milik pribadi oleh si pemegang paten.

Persoalan buruh juga sebenarnya tidak terlalu bergeser jauh dengan apa yang sudah terjadi dalam privatisasi. Hubungan kerja yang dulu bersifat lebih pasti sekarang menjadi lebih fleksibel dalam segala hal, baik itu pada soal upah, jam kerja, status kerja, atau pun jenis pekerjaan. Hubungan buruh dan majikan menjadi lebih fleksibel di sini. Konsep *flexibility market labour* ini berakibat pada mudahnya majikan untuk memecat/memberhentikan buruh ketika dianggap sudah tidak mampu bekerja sesuai target pemilik modal untuk kemudian digantikan oleh tenaga muda yang lain. Di samping itu juga

jaminan kesejahteraan buruh kurang terpenuhi karena posisi mereka yang tidak begitu jelas, yaitu sebagai buruh kontrak. Kondisi buruh yang hanya sebagai buruh kontrak ini pun ternyata juga membawa implikasi pada semakin matinya gerakan serikat buruh. Sedangkan persoalan yang keempat adalah masalah kelestarian lingkungan hidup. Meskipun tidak sepenuhnya persoalan lingkungan hidup muncul akibat globalisasi, namun setidaknya proyek globalisasi dianggap sebagai pemicu utama semakin buruknya kualitas lingkungan hidup kita. Karena manusia kemudian hanya berorientasi pada masalah ekonomi, kemanfaatan yang sesaat dan cenderung mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup yang sebenarnya merupakan asset jangka panjang.

E. Penutup: Membongkar Hegemoni Globalisasi

Dari paparan di atas tampaknya slogan globalisasi yang mengatakan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia hanyalah omong kosong belaka. Karena yang terjadi dalam realitas, globalisasi hanyalah sekedar proyek yang sengaja diusung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (yaitu pemilik modal) untuk mengembangkan kekuasaannya. Ideologi besar yang diusung, yaitu penekanan pada mekanisme pasar bebas, ternyata justru menimbulkan ketimpangan yang semakin besar antara yang bermodal dengan yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang kemudian diajukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara-negara penghutang (yang membutuhkan bantuan modal) menjadi semakin terpuruk. Kebijakan SAPs justru menjadi semacam hak istimewa bagi para pemilik modal untuk menancapkan kekuasaannya. Hal ini juga membuat posisi tawar dari negara berkembang menjadi semakin lemah.

Kenapa kebanyakan negara berkembang justru semakin terpuruk dengan adanya globalisasi? Secara logis hal ini dapat diketahui karena kondisi negara berkembang yang jauh berbeda dengan negara maju. Negara berkembang memiliki beberapa kelemahan dibandingkan negara maju. Kelemahan itu antara lain karena negara sedang berkembang secara ekonomi lemah untuk memulai integrasi dengan pasar dunia, karena rendahnya kapasitas ekonomi domestik dan infrastruktur sebagai warisan masa penjajahan. Kondisi ini semakin dipersulit dengan tingkat harga

eksport yang rendah, penurunan dasar tukar perdagangan secara signifikan, krisis hutang, serta beban pembayaran hutang. Berbagai persyaratan yang melekat pada paket kebijakan penjadwalan hutang kembali menghambat pemulihan berbagai negara dan menyebabkan semakin merosotnya pelayanan sosial. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu dahsyat yang menyebabkan negara dunia ketiga semakin terbelakang. Adanya perbedaan kapasitas antara negara utara (maju) dengan negara selatan (berkembang) inilah yang *diabaikan* oleh penganut neo-liberal. *Starting point* yang berbeda antar negara yang seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan nyatanya hanya diabaikan begitu saja oleh kaum neo-liberal. Lalu bagaimana seharusnya upaya dari negara dunia ketiga untuk melawan ini semua?

Dalam pandangan Antonio Gramsci, upaya menentang hegemoni ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *war of position* dan *war of maneuver* (Patria, 2003: 180). Namun dalam perspektif teori kritis hal ini akan lebih diarahkan pada *war of position*, sehingga lebih pada tataran bagaimana melawan hegemoni yang ada sekarang dengan membentuk hegemoni yang lain. Arahnya adalah pada upaya penciptaan kesadaran. Perang posisi di sini merupakan perang jangka panjang dengan sasaran superstruktur kebudayaan dari kelas dominan (dalam hal ini negara maju sebagai pengusung globalisasi). Dalam proses ini negara sedang berkembang menyiapkan jalan bagi terbentuknya budaya baru dan konsep hubungan internasional bentuk baru yang hal ini dilakukan melalui kritik terhadap ideologi dominan.

Kalau selama ini paham neo-liberalisme dengan konsep pasar bebas dan perdagangan bebasnya begitu menghegemoni pemikiran masyarakat, maka dengan menunjukkan bukti kegagalan neo-liberal perang posisi mulai dijalankan. Harus mulai dibentuk kesadaran bahwa sebenarnya setiap negara memiliki kondisi yang berbeda dalam mengatur perekonomiannya, sehingga menguniversalkan konsep pasar bebas bukanlah sesuatu yang sepantasnya dilakukan dalam upaya penciptaan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dalam hal ini kenapa negara berkembang tidak mampu bertahan menghadapi globalisasi, karena seperti sudah diuraikan di atas bahwa mereka ini memiliki *starting point* yang berbeda. Yang hal ini mengakibatkan diperlukannya peran negara untuk mengatur tata kehidupan

perekonomiannya, Hal ini dapat dilihat pada kasus Korea Selatan dan Taiwan misalnya (Kiely, 1998: 375). Negara tidak boleh melepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar, karena sebenarnya ada kecenderungan dari mekanisme pasar tersebut yang tidak atau kurang stabil. Realitas menunjukkan bahwa peletakan sepenuhnya kegiatan perekonomian pada mekanisme pasar pada kenyataannya justru mengakibatkan terjadinya penumpukan modal pada sebagian kecil orang. Sehingga globalisasi pada akhirnya hanya dijadikan proyek oleh para pemilik modal untuk mengembangkan kekuasaannya. Dengan adanya kesadaran atas kondisi yang senyatanya ini, maka yang harus dikembangkan adalah upaya demokratisasi. Yaitu bagaimana sejauh mungkin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan asset negara. Hal ini sebenarnya mengarah pada upaya penguatan ranah domestik, untuk menangkal kekuatan global. Di sini negara dituntut untuk mampu berperan secara lebih akomodatif terhadap penguatan ekonomi domestik. Negara tidak boleh lagi menjadi tangan kanan para pemilik modal, melainkan harus secara sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2004, "Bahaya Privatisasi BUMN" dalam **Jurnal Demokrasi Jurnal Forum LSM DIY**, Volume II, No. 4, Juni 2004.
- Devetak, Richard, 2001, "Critical Theory" dalam **Theories of International Relations**, Palgrave, Hampshire England.
- Khor, Marthin, 2001, **Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan**, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Kiely, Ray, 1998, "Neo liberalisme revised? A critical account of World Bank concepts of good governance and market friendly intervention", dalam **Jurnal Critical Sociology**, Department of Sociology University of Oregon, Eugene, USA.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, 2003, **Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Priyono, B. Herry, 2003, “Dalam Pusaran Neo Liberalisme” dalam **Neo Liberalisme**, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Wibowo, I., 2003, **Neoliberalisme**, Cindelararas Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2004, **Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara dalam Pembangunan**, Tajidu Press, Yogyakarta.